



LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN
2025
KECAMATAN BOLAANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Atas Kehadirat Allah SWT atas Limpahan Berkat dan Rahmatnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 ini dapat tersusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada para pembaca mengenai kondisi dan situasi Kecamatan Bolaang pada Tahun 2025. Kinerja Kecamatan yang digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disusun berdasarkan dari Laporan Kepegawaian, Program dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025 Kecamatan Bolaang. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini masih banyak kekurangan baik kelengkapan maupun akurasi serta ketepatan waktu maupun penyajiannya, untuk itu guna kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini dimasa datang, kami harapkan kritik dan saran dari pembaca.

Demikian atas bantuan berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan ini kami ucapkan terima kasih.

CAMAT BOLAANG



NINI KUSRINI TOHIS,SIK
PEMBINA TKT. I

NIP. 19780918 200501 2 014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.GAMBARAN UMUM KECAMATAN BOLAANG

B.ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

C.PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BOLAANG

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

A. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BOLAANG

B. PERJANJIAN KINERJA

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAB III AKUTANBILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BOLAANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Bolaang dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow. Kecamatan merupakan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Bolaang berada di kelurahan inobonto yang dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Merumuskan rencana, program dan kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
2. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu,
3. Pembinaan Pemerintah Desa,
4. Pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban wilayah,
5. Pembinaan kesejahteraan masyarakat.

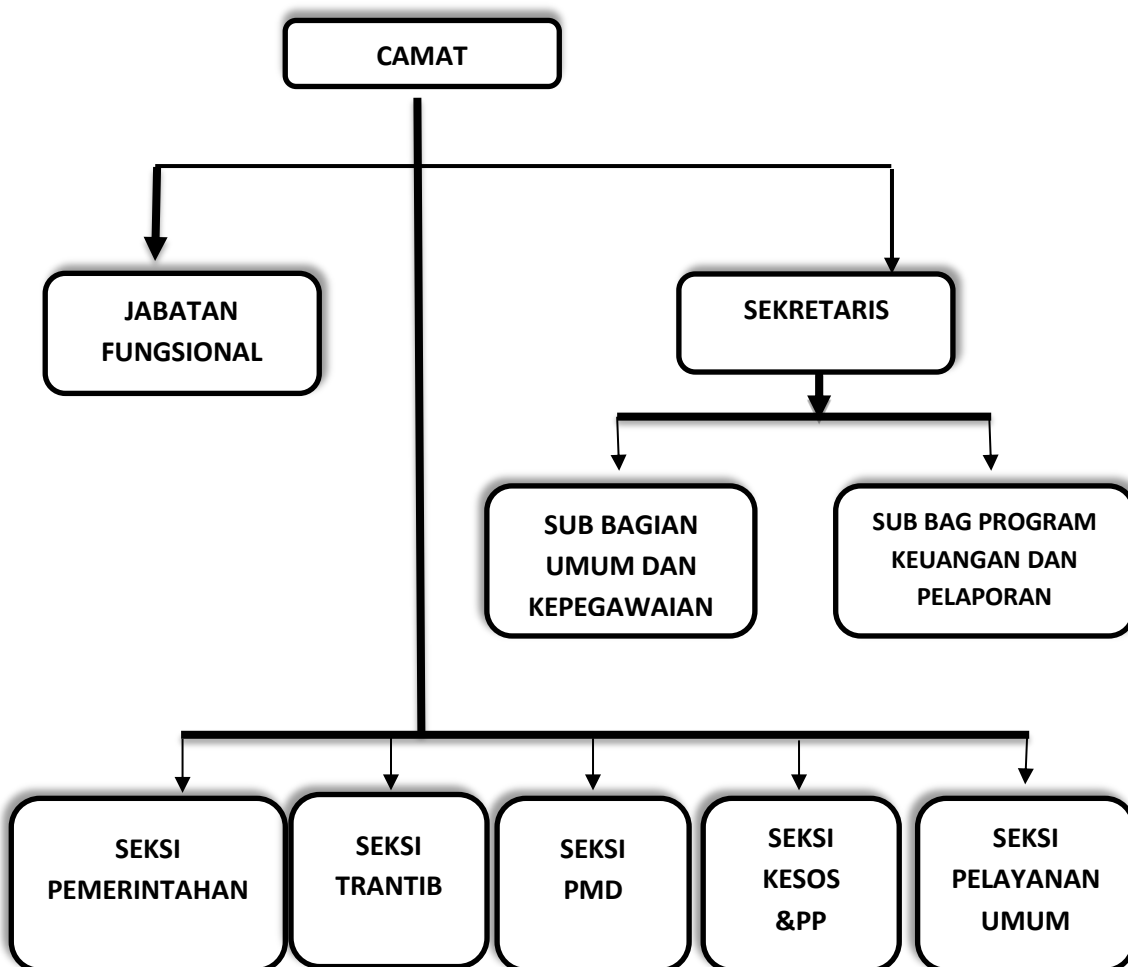
Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh :

- a. Sekretaris Kecamatan,
- b. Seksi Pemerintahan,
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan,
- f. Seksi Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan Administrasi Kecamatan, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Struktur Organisasi Kantor Camat Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2016 sebagai berikut :

• Camat	Eselon III/a
• Sekretaris Camat	Eselon III/b
• Kepala Seksi Pelayanan Umum	Eselon IV/a
• Kepala Seksi Pemerintahan	Eselon IV/a
• Kepala Seksi PMD	Eselon IV/a
• Kepala Seksi Kesos dan PP	Eselon IV/a
• Kepala Seksi Trantib	Eselon IV/a
• Kasubag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV/b
• Kasubag Program, Keuangan & Pelaporan	Eselon IV/b

Kantor Camat Bolaang mempunyai personil sebanyak 22 orang dan PPPK 4 Orang yang terdiri dari :

Golongan V	= 4 Orang
Golongan IV/A	= 1 Orang
Golongan III/d	= 8 Orang
Golongan III/c	= 2 Orang
Golongan III/b	= 1 Orang
Golongan III/a	= 1 Orang
Golongan II/d	= 2 Orang
Golongan II/c	= 3 Orang

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan Bolaang sangat penting keberadaannya untuk masyarakat, hal ini disebabkan karena Kondisi dan potensi yang ada di Kecamatan Bolaang merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lingkungan Strategi Kecamatan Bolaang adalah sebagai berikut :

a. Geografis

Kecamatan Bolaang mempunyai nilai historis dalam sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow, dulunya merupakan tempat kedudukan

dari istana raja pada awal abad 17 sampai akhir abad 19, tepatnya di desa Bolaang. Batas geografis kecamatan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi
- Sebelah Timur : Bolaang Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lolak
- Sebelah Barat : Kecamatan Passi Barat

Desa Inobonto I yang menjadi Ibu kota dari Kecamatan Bolaang dapat diakses dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) dengan waktu tempuh $\pm$ 3 Jam dan berjarak 144 Km. Sementara bila di akses dari Kota Kotamobagu hanya berjarak 40 Km dengan waktu tempuh kurang dari 1 Jam.

Topografi Kecamatan Bolaang beragam mulai dari dataran landai dan bergelombang dengan ketinggian tempat 3 mdpl (meter diatas permukaan laut) yang diukur dari ibu kota kecamatan.

Luas Kecamatan Bolaang keseluruhannya mencapai 14.803 Hektar atau 4,21 persen dari Luas Kabupaten Bolaang Mongondow). Dimana hamparan sawahnya mencapai 1.004,5 hektar, sementara lahan yang digunakan untuk pemukiman 416 hektar (Hasil Sensus Potensi Desa, 2008).

Di tahun 2017 Kecamatan Bolaang memiliki 11 desa yang semuanya sudah definitif. Disamping terdapat satu Desa dengan tipe Kelurahan yaitu Kelurahan Inobonto I.

Desa dengan luas terbesar adalah Desa Bangomolunou yaitu seluas 38,54 km² atau 26,04 persen dari total luas Kecamatan sedangkan desa yang memiliki luas terkecil adalah Desa Inobonto I yaitu hanya seluas 3,62 km² atau sebesar 2,45 persen dari total luas wilayah Kecamatan.

b. Kependudukan

Keadaan penduduk di Kecamatan Bolaang pada tahun 2021 sebanyak 17.030 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 8.925 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 8.105 jiwa. Desa dengan Jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Inobonto I yaitu se-banyak 4.258 jiwa.

Sex ratio secara umum diatas seratus keadaan tahun 2021 sebesar 110,13 persen dan jika dilihat sex ratio per desa maka, semua desa yang ada

diatas 100 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

c. Sosial Politik

Perubahan petapolitik Nasional telah membawa dampak terbukanya kran Demokrasi dan kebebasan bagi rakyat. Berkembangnya tuntutan dinamika dan aspirasi masyarakat saat ini adalah merupakan pemicu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas Pemerintahan yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya dan dapat semudah mungkin dijangkau masyarakat.

Perubahan lingkungan seperti diuraikan diatas, menuntut manajemen organisasi Kecamatan Bolaang mengubah logika yang dipakai sebagai dasar menjalankan roda organisasinya. Pengetahuan manajemen berkembang melalui proses pergeseran paradigma yaitu manajemen tradisional, bergeser kepada paradigma baru sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

d. Pertanian dan Perkebunan

Wilayah kecamatan Bolaang memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang cukup baik sehingga perlu adanya peningkatan Prasarana jalan yang lebih memadai

C. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BOLAANG

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bolaang menghadapi beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penataan gedung kantor guna pemenuhan standar kelayakan kerja
2. Kurangnya sarana kendaraan Dinas/Operasional sebagai sarana untuk melaksanakan tugas
3. Perlu adanya pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, sehingga dapat menghasilkan aparatur yang kreatif dan inovatif
4. Perlunya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap Kelurahan/Desa bersama dengan aparat terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Visi utamanya adalah **BOLMONG JUARA** yang merupakan akronim dari **BOLAANG MONGONDOW MAJU DAN SEJAHTERA**. Dibalik kata “BOLMONG JUARA” tersimpan semua niatan dan semangat agar siapa saja yang sering mengucapkannya dan meneriakkannya, maka akan tertanam dalam alam bawah sadar sehingga menjadi energi baru sebagai daya dorong untuk menjadi “juara” sebagai ruh dan etos kerja. Visi “BOLMONG JUARA” adalah membangun Kabupaten Bolaang Mongondow yang Maju dan Sejahtera, dengan tiga pilar pembangunan yaitu inovasi, kolaborasi dan desentralisasi.

Visi Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera mengandung makna sebagai berikut:

Maju = menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow yang berdaya saing tinggi, unggul, modern, tangguh, inovatif, kreatif, adaptif dan berkeadilan, di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selain itu, membangun Masyarakat Bolaang Mongondow yang Maju adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi meliputi bidang “kesehatan, bidang pendidikan dan sarana prasarana pemerintahan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

Sejahtera = menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow yang Sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan

masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar meliputi sandang, pangan dan papan, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merumuskan lima misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Mengembangkan sumber daya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik yang inklusif

2. Misi Kedua

Meningkatkan Infrastruktur Daerah Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan.

3. Misi Ketiga

Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Transparan.

4. Misi Keempat

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Membangun Perekonomian yang Kreatif, Inovatif Berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal.

5. Misi Kelima

Menjadikan Kehidupan Masyarakat lebih Harmonis dan Toleran

2. Visi dan Misi Kecamatan Bolaang

Untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow maka Kecamatan Bolaang menetapkan :

Visi :

“Bolaang Mongondow yang Baru, Berbudaya, Berdaya saing dan Mandiri sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kecamatan Bolaang menetapkan misi sebagai berikut : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan bebas KKN”

3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bolaang

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Kecamatan Bolaang

Sasaran: Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Bolaang**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator atau tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke.			
						2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	78	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	63	70	73	78

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut komitmen Kecamatan Bolaang untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bolaang tahun 2025-2029, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Kecamatan Bolaang tahun 2025 :

Revisi Perjanjian Kinerja Kecamatan Bolaang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	70	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.551.166.711
				Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	710.375.788
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.489.919

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Bolaang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bolaang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Hasil Penelitian oleh KemenPAN dan RB	70

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). RKT TA. 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Kecamatan Bolaang yang dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Kecamatan Bolaang dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Indikator kinerja dimaksud adalah :

1. Spesifik dan jelas,
2. Dapat diukur secara objektif,
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
4. Tidak bias.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan residen Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui target sasaran Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja.

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Kecamatan Bolaang, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	= Sangat berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang

	Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori
Capaian Sasaran=	$\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai } mean \text{ setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$

ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut

Sangat Berhasil :	92,5
Berhasil :	77,5
Cukup Berhasil :	62,5
Tidak Berhasil :	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bolaang terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran . diketahui bahwa tujuan dari pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan sosial kemasyarakatan adalah dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bolaang dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Uraian dan analisis capaian kinerja masing- masing sasaran kecamatan Bolaang adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan

Pengukuran tingkat capaian sasaran “Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan” dengan indikator sasaran “Nilai Predikat SAKIP Organisasi Perangkat Daerah” dilakukan melalui penilaian menyeluruh dari peningkatan kinerja pemerintah kecamatan. SAKIP merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Sehingga peningkatan kinerja sangat berhubungan dengan tingkat pelayanan publik dari suatu instansi khususnya menyangkut urusan kewilayahan (kecamatan). Dalam penghitungan nilai sakip didasarkan pada penilaian yang dilaksanakan oleh tim evaluator sakip pemerintah yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Sehingga untuk penentuan formula didasarkan dari nilai LHE tim evaluator.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Bolaang tahun 2025

Tabel 3.1
Capaian Indikator Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	70	tahap Penyusunan	Menunggu hasil

Nilai Sakip Kecamatan Bolaang Tahun 2025 belum bisa diukur, sehingga capaian Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Bolaang pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan pencapaiannya



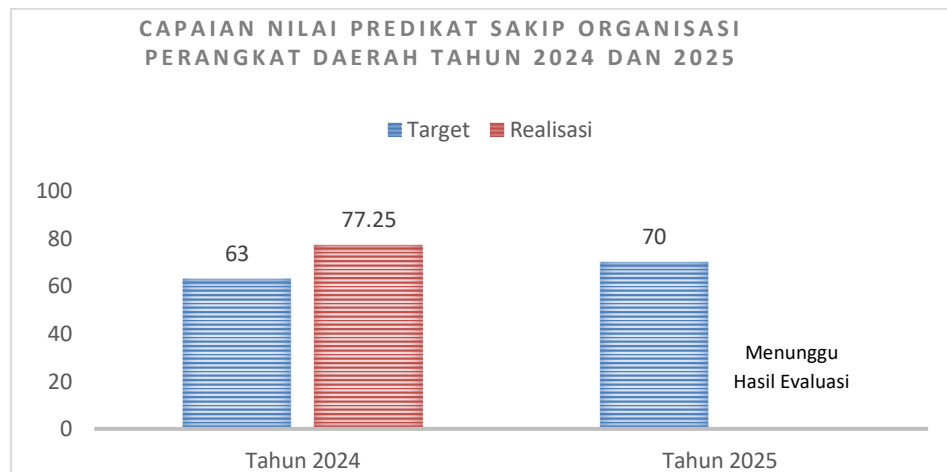
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja antara tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.2

Capaian Indikator Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2025

	INDIKATOR	2024			2025			TARGET AKHIR RENSTRA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
¹	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	63	77,25	119,4	70	Menunggu Hasil Evaluasi	0	78

Nilai Sakip Kecamatan Bolaang Tahun 2025 belum bisa diukur, sehingga capaian Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Bolaang pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan pencapaiannya. Pada Tahun 2024 Kecamatan Bolaang memperoleh Nilai **77,25** atau Predikat B mencapai target.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Pengukuran Kinerja

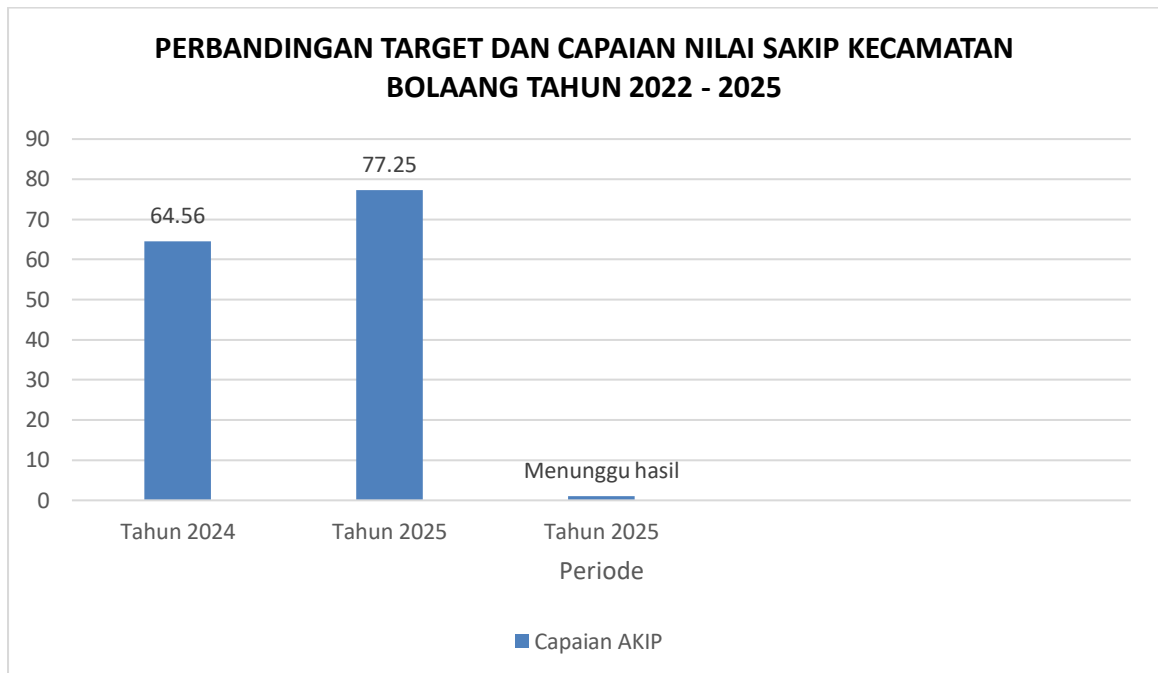
Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 -2025 berdasarkan Target Akhir Renstra secara rinci dapat diuraikan pada table berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	64,56	77,25	Mennunggu hasil	Mennunggu hasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah dan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada peraturan menteri tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Kecamatan Bolaang masih dalam tahap Penyusunan.
- Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Kecamatan Bolaang berhasil meraih Nilai 77,25 dengan predikat “BB”.
- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Bolaang berhasil meraih Nilai 64,56 Dengan Predikat “B”

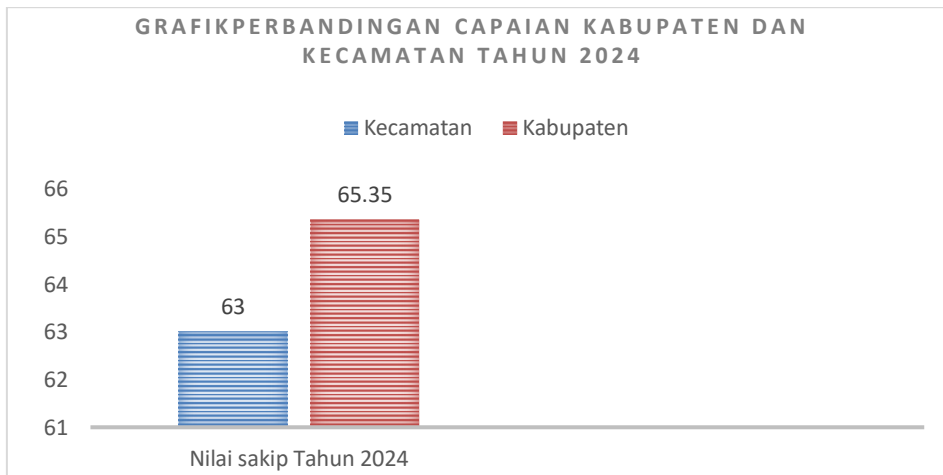


4. Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar kabupaten (jika ada)

Adapun perbandingan capaian dengan standar yang ada, dapat kita lihat pa tabel berikut ;

Instansi	Nilai
Kabupaten	65,35
Kecamatan	70,00

Berdasarkan tabel diatas sesuai hasil evaluasi KemenPAN Tahun 2024 Kabupaten memperoleh nilai 65,35 dan Kecamatan sesuai evaluasi Inspektorat Daerah Tahun 2024 memperoleh nilai 70,00 data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.



5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Hasil Evaluasi mengacu pada tahun sebelumnya menunjukkan perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2023	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,53
2	Pengukuran Kinerja	30	17,22
3	Pelaporan Kinerja	15	12,83
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,66
	Nilai Hasil Evaluasi		77,25
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Rekomendasi :

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam hasil evaluasi diatas,direkomendasikan agar dilakukang lanhkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

a.Komponen Evaluasi dan Perencanaan Kinerja

- Menyusun dan Menetapkan dokumen proses bisnis dan/atau SOP Monev Renstra Kecamatan Bolaang;
- Lebih memperhatikan lagi penetapan indikator kinerja dengan Prinsip SMARTC serta menyelaraskan indikator tujuan dan sasaran antar dokumen perencanaan;
- Menyusun dan Menetapkan crosscuting Kecamatan Bolaang;

- o Melaksanakan kegiatan rapat/pembahasan dalam rangka perumusan perencanaan kinerja/Rencana Aksi;
- o Membuat aplikasi pengumpulan data kinerja;

b. Komponen Evaluasi atas pengukuran Kinerja

- o Menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pengukuran data Kinerja baik berupa SK dan/atau SOP Kecamatan Bolaang;
- o Melakukan revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja;
- o Melaksanakan Monitoring Rencana Aksi serta evaluasi atas kinerja rencana aksi;
- o Memanfaatkan dukungan teknologi (Aplikasi) dalam rangka pengumpulan data kinerja;
- o Melaksanakan monitoring Rencana Aksi atas hasil pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Anggaran serta penyesuaian aktifitas dan strategi dalam pencapaian kinerja;
- o Melaksanakan monitoring Rencana Aksi atas hasil pengukuran kinerja mempengaruhi efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- o Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja dengan cara di upload pada website Kecamatan Bolaang;
- o Melaksanakan rapat internal dalam rangka pembahasan atas KljIP Kecamatan Bolaang;

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- o Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi Kecamatan Bolaang;
- o Melakukan evaluasi AKIP secara berjenjang pada internal Kecamatan Bolaang;
- o Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Kinerja

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Dalam Proses Penyusunan	96.77%	-

Target Efisiensi Pada Indikator Capaian Kinerja dalam proses penyusunan dan capaian Realisasi Anggaran Sebesar 96.77%

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Sebanyak 7 kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bolaang pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Bolaang memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Kecamatan Bolaang pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 3.277.032.418,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 2.915.231.171,00 atau 88,71%, sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.206.542.644,00 Belanja modal yang dikelola Kecamatan Bolaang pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 215.683.332,00 dan realisasi sebesar Rp. 199.276.476,00 atau 92,39%.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI APBD	%
1	Belanja	3.277.032.418	2.915.231.171	88,95
2	Belanja Operasi	3.061.349.086	2.715.954.695	88,71
3	Belanja Pegawai	2.298.997.880	1.969.285.434	85,65
4	Belanja Barang Dan Jasa	762.351.206	746.669.261	97,94
5	Belanja Modal	215.683.332	199.276.476	92,39
6	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	
7	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	215.683.332	199.276.476	92,39
8	Surplus/ (Defisit)	(3.277.032.418)	(2.915.231.171)	88,95
9	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)	(3.277.032.418)	(2.915.231.171)	88,95

2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Capaian kinerja realisasi anggaran program / kegiatan / sub kegiatan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN BELANJA	JUMLAH DANA	REALISASI	%
I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.551.166.711,00	2.217.663.695,00	86,92%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.332.914.039,00	2.002.818.730,00	85,85%
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.289.997.880,00	1.961.685.434,00	85,66%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.259.800,00	33.660.000,00	95,46%
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.656.359,00	7.473.296,00	93,15%
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	-Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.565.000	103.531.000	99,97%
	-Fasilitas Kunjungan Tamu	7.875.000	7.875.000	100%
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.690.000	95.656.000	99,96%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.752.500	74.582.980	99,72%
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.752.500	9.582.980	89,12%
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.000.000	65.000.000	100%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.935.172	36.730.985	94,33%
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	30.935.172	29.035.200	93,85%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.695.785	96,20%
II.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	710.375.788	688.021.076	96,85%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		710.375.788	688.021.076	96,85%
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	494.692.456	488.744.600	98,80%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	215.683.332	199.276.476	92,39%
III.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.489.919	9.546.400	61,63%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		15.489.919	9.546.400	61,63%
1	-Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.489.919	9.546.400	61,63%
JUMLAH TOTAL =		Rp. 3.277.032.418	Rp. 2.915.231.171	88,95%

I. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota

Kegiatan :

1. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Capaian target kinerja keuangan 85,85% secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan. Hal ini bisa dilihat dengan capaian yang hampir mendekati 100%

2. *Administrasi Kepegawaian perangkat daerah*

Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Capaian target kinerja keuangan tidak di anggarkan di tahun 2025

3. *Administrasi umum perangkat daerah*

Capaian target kinerja Administrasi umum perangkat daerah 99,20% secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan. Hal ini bisa dilihat dengan capaian yang hampir mendekati 100%

4. *Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta daerah.*

Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Capaian target kinerja keuangan tidak di anggarkan di tahun 2025

5. *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*

Capaian target kinerja *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* 99,72% secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan. Hal ini bisa dilihat dengan capaian yang hampir mendekati 100%

6. *Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*

Capaian target kinerja pemeliharaan barang milik daerah 94,33% secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan. Hal ini bisa dilihat dengan capaian yang hampir mendekati 100

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan pemberdayaan kelurahan

Capaian target kinerja pemberdayaan kelurahan 98,80% secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan. Hal ini bisa dilihat dengan capaian yang hampir mendekati 100

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Capaian target kinerja pemberdayaan kelurahan 92,39% secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan. Hal ini bisa dilihat dengan capaian yang hampir mendekati 100

III. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan telah di anggarkan sebesar Rp. 15.489.919 dan berdasarkan evaluasi sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi anggaran sub. Kegiatan tersebut hanya terealisasi Rp. 9.546.400 atau sebesar 61,63% dari pagu anggaran yang di tetapkan. Capaian ini berada dibawah target minimal realisasi karena yang terealisasi hanya makan minum yang realisasinya dibayarkan berdasarkan kebutuhan, sementara kegiatan yang tidak terealisasi antara lain Sewa Kanopi, Sewa Sound system, ATK, dan Sewa Kursi tidak terealisasi karena kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Langagon sehingga semua menggunakan fasilitas Desa yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Kecamatan Bolaang 2025-2029 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi sebagaimana uraian pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran Kecamatan Bolaang pada tahun 2025

pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan adalah sebesar **119,4%**, sehingga dapat dinyatakan “Berhasil”, Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja Kecamatan Bolaang pada tahun 2025 adalah mencapai **88,95%**

Berbagai pelaksanaan program yang dilakukan pada TA. 2025 ini merupakan hasil dari penyusunan program yang telah melibatkan berbagai stakeholders. Penyusunan program dan pelaksanaannya tetap berada pada alur dan koridor perencanaan strategis Kecamatan Bolaang 2025 – 2029 sehingga semua kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2025 tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Bolaang tahun 2025-2029.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam organisasi pemerintah kabupaten, maka program-program yang dilakukan tetap dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan diarahkan sebagai media dan sarana untuk mendukung Visi dan Misi serta Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bolaang pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2025 s.d 2029.
2. Mengevaluasi Program dan Kegiatan yang belum terimplementasi secara maksimal untuk dilakukan perbaikan antara lain mengkoordinasikan ke pihak terkait.
3. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah Kecamatan Bolaang dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kecamatan Bolaang yang mengacu kepada tahapan pelaksanaan Renstra tahun 2017- 2022.
5. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi

Inobonto, Januari 2026

CAMAT BOLAANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



NINI KUSRINI TOHIS, SIK
PENATA TKT. I
NIP. 19780918 200501 2 014